

Dampak Subsidi Pendidikan terhadap Tingkat Pendidikan dan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga di Indonesia (Social Accounting Matrix Indonesia 2006)

Dendi Romadhon, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20340088&lokasi=lokal>

Abstrak

Perkembangan ekonomi dan teknologi menuntut ketersediaan tenaga kerja yang mempunyai keahlian yang memadai. Data Produk Domestik Bruto (PDB) serta Sakemas tahun 2003 dan 2006 dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 persen pertumbuhan ekonomi membutuhkan pekerja berpendidikan S1 ke atas sebesar 2,3 persen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan semakin banyak ketersediaan tenaga kerja berpendidikan S1 ke atas. Karena untuk menghasilkan pekerja berpendidikan tinggi memerlukan pembiayaan yang cukup besar, maka subsidi pendidikan menjadi suatu hal yang tidak dapat guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi di masa akan datang.

Pemerintah Indonesia telah lama mencanangkan subsidi pendidikan guna menyiapkan sumber daya manusia yang handal. Perubahan sasaran subsidi pendidikan terus berlangsung sesuai dengan proses berjalannya waktu. Indonesia pernah mencanangkan wajib belajar 6 tahun, kemudian bergeser menjadi wajib belajar 9 tahun, bahkan saat ini masyarakat sudah menuntut supaya dana pendidikan mencapai 20 persen dari APBN/APBD. Dibeberapa daerah kaya, 20 persen anggaran untuk pendidikan telah terealisasi.

Social Accounting Matrix (SAM) Indonesia tahun 2006 digunakan untuk mentransformasi pembahan alokasi anggaran subsidi pendidikan yang diluncurkan oleh pemerintah, guna meningkatkan pendapatan rumah tangga yang pada akhirnya akan mendorong rumah tangga mengalokasikan dananya untuk biaya pendidikan tinggi. Sedangkan alur subsidi pendidikan dirunut dengan menggunakan Structural Path Analysis (SPA).

Analisis dampak dari tabel SAM tahun 2006 menunjukkan bahwa setiap pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1 persen akan menyediakan kesempatan kerja berpendidikan S1 ke atas sebanyak 24| ribu ekivalen tenaga kerja (EIK). Apabila dilihat pertumbuhannya, maka setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi akan meminta pekerja berpendidikan S1 ke atas sebesar 4,12 persen.

Apabila golongan rumah tangga secara desil berdasarkan jumlah penduduk, maka 10 persen rumah tangga golongan paling bawah hanya menikmati pendapatan rumah tangga secara keseluruhan sebesar Rp 35,1 triliun. Untuk 10 persen golongan rumah tangga paling kaya menikmati pendapatan rumah tangga sebesar Rp 1.075,2 triliun. Ini menunjukkan bahwa gap pendapatan antara rumah tangga 10 persen termiskin dengan rumah tangga 10 persen terkaya sebesar 1 banding 31. Hasil simulasi subsidi pendidikan menunjukkan bahwa apabila subsidi pendidikan diberikan secara merata ke seluruh rumah tangga, melalui fasilitas pendidikan, maka

pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan meningkat sebesar 14 persen. Jika subsidi pendidikan hanya diberikan untuk rumah tangga golongan bawah, maka pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan meningkat sebesar 13 persen